

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan mengenai data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pengodean Diagnosis Penyakit Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.

- a. *Man* (SDM): Petugas yang melakukan pengodean rawat jalan belum sesuai dengan kualifikasi jabatan karena dilakukan oleh perawat.
- b. *Method* (cara): Kebijakan terkait pengodean rawat jalan sudah ada dan pelaksanaannya yang sudah optimal dilakukan adalah pasien jaminan JKN, pedoman pelayanan rekam medis terkait pengodean dan kualifikasi jabatan sudah ada dan pelaksanaannya mengacu pada pedoman tersebut, tapi belum seluruhnya karena masih ada yang menggunakan buku bantu dan tanggung jawab belum seluruhnya diserahkan kepada Instalasi Rekam Medis, regulasi internal terkait tata cara pengodean rawat jalan sudah ada, tapi belum mencantumkan prosedur pengodean rawat jalan untuk pasien non, serta prosedur pengodean rawat jalan JKN sesuai SPO tentang pemberian kode diagnosis penyakit di Instalasi Rekam Medis.
- c. *Material* (bahan): Pedoman pengodean perawat masih menggunakan buku bantu pengodean, tetapi belum disahkan oleh pimpinan rumah sakit.

- d. *Machine* (alat): Sarana yang digunakan dalam pengodean rawat jalan adalah *system bridging* INA-CBG's dan SIMRS RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah.
 - e. *Money* (finansial): Tunjangan sudah ada berupa gaji, tunjangan profesi pendidik dan jaminan pensiun dan untuk penilaian kinerja staf belum menerapkan sistem *reward* dan *punishment*.
2. Semua elemen penilaian pada MKI. 13 yang mengacu pada standar akreditasi KARS 2012 sudah terpenuhi dan rumah sakit sudah dinyatakan lulus akreditasi tipe B pendidikan tingkat paripurna.
 3. Persentase pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit rawat jalan sebesar 78,6 % dengan persentase sebesar 75,4 % untuk pasien jaminan JKN dan 3,2 % untuk pasien jaminan non JKN.
 4. Hambatan pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit pada pasien rawat jalan
 - a. *Man* (SDM): Petugas pelaksana pengodean tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan, belum adanya pembagian *job description* di Instalasi Rekam medis dari Kepala Instalasi Rekam Medis dan petugas *coding* dan perawat masih kesulitan membaca tulisan dokter.
 - b. *Method* (cara): Belum adanya SPO terkait pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit rawat jalan non JKN.
 - c. *Material* (bahan): Tidak ada aturan atau SK yang mengatur pemberlakuan buku bantu.
 - d. *Machine* (alat): Teknik penggunaan SIMRS terlalu ribet.

- e. *Money* (finansial): Belum menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk penilaian kinerja staf.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit pada pasien rawat jalan, yaitu:

1. Sebaiknya dibuatkan jadwal dan dilakukan supervisi dari pimpinan untuk ketertiban pelaksanaan pengodean, khususnya yang non JKN.
2. Sebaiknya aturan terkait pelaksanaan pengodean rawat jalan diperjelas, agar tidak terjadi kesenjangan antara pasien rawat jalan JKN dan non JKN.
3. Sebaiknya dilakukan evaluasi *job description* petugas *coding* rawat jalan dan kewenangannya terkait pelaksanaan pengodean diagnosis penyakit rawat jalan JKN dan non JKN.
4. Sebaiknya dilakukan evaluasi pemberlakuan dan penggunaan buku bantu sebagai dasar pedoman pengodean yang dilakukan oleh petugas rekam medis, bukan perawat.
5. Sebaiknya Kepala Instalasi Rekam Medis mengusulkan ke pimpinan rumah sakit agar penjamin mutu internal rumah sakit di setiap unit melakukan penilaian kinerja staf dengan *reward* dan *punishment*.